

**Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu;
Studi Kasustentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi(Samawi)
Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya**

oleh

Randi Hamdani ¹

Ari Ganjar Herdiansyah ²

Antik Bintari ³

Email: randihamdaniiii@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena partisipasi politik masih menjadi isu menarik bagi sarjana ilmu politik, karena seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Pergerakan pemuda yang tergabung dalam organisasi relawan menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan presiden 2019. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi politik pemuda dalam pemilu, keterlibatan tokoh tokoh muda dalam membentuk relawan samawi dan menggalang dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses dibentuknya relawan dan partisipasi politik pemuda pada pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah teori partisipasi politik oleh Huntington & Nelson (1994) antara lain: kegiatan pemilihan, lobby, kegiatan organisasi, contacting, tindakan kekerasan (violence). Hasil penelitian menunjukkan bahwa relawan samawi telah melaksanakan berbagai jenis partisipasi politik, misalnya: counter narasi terhadap isu-isu negative, hoax atau berita bohong, kegiatan relawan/volentarianisme yang tentunya berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda pada pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya.

Kata Kunci: Pemuda, Partisipasi Politik, Relawan Samawi dan Pilpres 2019

PENDAHULUAN

Perkembangan partisipasi politik di Indonesia saat ini sangat dinamis, khusus warga negara yang berpartisipasi dalam kegiatan yang lebih kreatif daripada mereka hanya menjadi subyek dari proses politik. Partisipasi konvensional, seperti suara dalam pemilihan dan menjadi anggota partai, telah mengalami tren menurun, atau "normalisasi," sejak terbalik dari era reformasi (Mujani 2007, 40). Di sisi lain, jumlah kelompok warga aktif mempengaruhi proses politik berkembang pesat, dalam bentuk kedua organisasi non-pemerintah dan kelompok-

kelompok relawan. Ini baik secara aktif berusaha untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui advokasi aktivitas, pemberdayaan masyarakat pemilih dan pemantauan pemilu. (Herdiansah: 2019). Tentu suatu perhelatan akan semarak ketika seluruh elemen bangsa mengambil perannya dalam pemilu. Sebut saja pemuda Indonesia yang telah terbukti menjadi motor penggerak perubahan di negeri ini. Partisipasi pemuda di tahun politik tentu tidak diragukan lagi dengan menggerakkan dan menyemarakkan perhelatan Pilpres. Partisipasi pemuda ini dapat digolongkan ke dalam partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Huntington & Nelson, 1994:5). Selanjutnya Ramlan Surbakti (2010:180) juga memberikan pengertian yang sejalan dengan pengertian partisipasi politik diatas yakni: partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta menentukan pimpinan pemerintahan. Partisipasi politik tersebut didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa.

Pilpres 2019 sebagai salah satu proses berjalannya demokrasi, dimana mempertemukan kembali bertarungnya calon presiden Ir. H. Joko Widodo dan Prabowo. Pilpres 2019 sebagian pengulangan dari 2014, berbeda dengan pilpres 2004 dan 2009. Hal tersebut karena capresnya sama, isunya mirip, sebagian partai utamanya pun sama. PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PKPI dikubu Ir. H. Joko Widodo dan ada Gerindra, PKS, PAN dikubu prabowo. Sisanya partai loncatan PPP, Golkar, PBB yang berpindah dukungan serta ditambah partai baru yaitu PSI dan Perindo mendukung Ir. H. Joko Widodo. Sedangkan Prabowo dukungan tambahan dari partai pendukung yaitu, partai Berkarya dan partai Garuda. Partai berbasis agama ada di kedua belah pihak. Bedanya basis nahdhiyin “bulat” di kubu Ir. H. Joko Widodo (PKB dan PPP) juga dukungan dari NU struktural, dimana seluruh jajaran utamanya secara terang-terangan berada di kubu Ir. H. Joko Widodo dan yang lebih jelas KH. Ma’ruf Amin sebagai cawapres Ir. H. Joko Widodo ialah Muhtasyar PBNU, tokoh utama di struktural walaupun tidak serta merta menjamin NU kultural beserta warga NU akan total ikut ke kubu Ir. H. Joko Widodo. (Wahid, Kompasiana.com :2018).

Selain itu, pilpres 2019 juga terdapat sesuatu yang menarik, dimana kedua pasangan capres dan cawapres sama-sama menyatakan bahwa mereka didukung oleh simpul-simpul kekuatan masyarakat yang menyebut diri sebagai relawan dan memberikan sumbangan berupa tenaga, dukungan dan ide kepada kandidat tanpa mau diberi imbalan tertentu. Fenomena hadirnya relawan bukan hal pertama kali terjadi, seperti misalnya kejadian di pilpres 2014 lalu. Tetapi, yang lebih menonjol pada pilpres 2019 gerakan relawan sangat menjamur, dari

tingkatan daerah sampai tingkatan nasional. Mulai relawan dari kalangan partai politik sampai relawan kalangan masyarakat tergabung dalam unsur pemuda, agama bahkan unsur Pendidikan SMA/Perguruan Tinggi (Purboningsih :2015).

Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Ir. H. Joko Widodo – Ma’ruf, dikutip dalam Tempo.com, mengklaim sampai 570 organ relawan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon Presiden atau Wakil Presiden Joko Widodo atau Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Salah satu relawan tersebut misalnya Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI). Dengan harapan kehadiran organisasi relawan tersebut mampu meningkatkan partisipasi dan memenangkan pasangan Ir. H. Joko Widodo – Ma’ruf menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Samawi merupakan organisasi relawan yang dibentuk oleh para anak muda dari berbagai latar belakang profesi dan organisasi Islam, sebagai wujud *Ijtihad* dan *Ikhtiyar* politik, sekaligus bentuk bakti kepada bangsa, agama dan negara. Penelitian ini tertarik untuk mengkaji relawan Samawi. Adapun lokus penelitian dilakukan di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini diberi judul “*Partisipasi Politik Pemuda dalam Pemilu; Studi Kasus Tentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI) Pada Pemilihan Presiden 2019 di Kota Tasikmalaya.*”

KAJIAN TEORITIS

Ada sejumlah konsep atau pengertian tentang partisipasi politik. Misalnya dari Kevin R. Hardwick berikut ini: “*Political participation concerns the manner in which citizens interact with government, citizens attempt to convey their needs to public officials in the hope of having these needs met*, (Frank N. Magill, eds, 1996: 1016).” Sedangkan menurut Samuel Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, 1994: 5). McClosky (1972), menegaskan: “*The term ‘political partisipation’ will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public pulicy.*” (Partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum).” Nie & Verba (1975) secara khusus mengartikan partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Menurut keduanya, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakantindakan yang diambil oleh mereka. Yang terutama diteropong oleh dua ilmuwan ini adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (*the authoritative allocation of values for a society*). Ramlan

Surbakti mengartikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1992: 141). Berdasarkan definisi konseptual tersebut dan penjelasannya, setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh bukan warga negara biasa. Institusi yang menjadi objek politik dalam partisipasi politik adalah pemerintah sebagai pemegang otoritas. Partisipasi politik juga memiliki tujuan-tujuan yang berkenaan dengan signifikansi partisipasi politik terhadap aktivitas-aktivitas pemerintahan. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur, atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai dampak, dan ini dinamakan *political efficacy*.

Istilah volunteerisme sering digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Istilah volunteerisme secara sederhana memiliki makna yaitu kesukarelawanan. Dalam Kamus Sosiologi (1992), volunteerisme merujuk pada tindakan-tindakan aktor secara sukarela, dan tidak karena ditentukan oleh struktur sosial. Selanjutnya Robotham (1998) menyatakan bahwa volunteerisme merupakan tindakan yang bersifat sosial atau kemasyarakatan, yang didorong oleh motif altruistik, dimana aktor tidak memperoleh upah, gaji atau keuntungan materiil. Secara umum, volunteerisme dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan dimana seseorang melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang berguna bagi kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan penuh komitmen, ketulusan, tanpa disertai imbalan materiil. Gawthrop dalam Corten (2002) menjelaskan bahwa kegiatan volunteerisme dalam organisasi-organisasi sukarela mampu memberikan sumber tantangan dan kepuasan yang luar biasa, yang tidak didapatkan dalam pekerjaan-pekerjaan biasa bahkan dalam pekerjaan bergaji besar sekalipun. Dalam perspektif Sosiologi *volunteerisme* dipahami sebagai sebuah fenomena sosial yang melibatkan pola hubungan sosial dan interaksi diantara individu, kelompok dan asosiasi atau organisasi. Perhatian Sosiologi dalam studi tentang *volunteerisme* dapat ditelusuri pada pernyataan klasik tentang *social order* dan solidaritas sosial, atau tingkat integrasi dari suatu masyarakat (Durkheim, 1983). Hal tersebut menunjuk pada jenis ikatan sosial yang mengikat anggota masyarakat satu dengan yang lain. Karena sifatnya yang sukarela, tidak dibayar, dan merupakan fenomena yang berorientasi secara kolektif, *volunteerisme* merepresentasikan tipe ikatan sosial yang khas dan berbeda dari ikatan sosial yang lebih formal, jaringan (kekerabatan atau rekanan), sistem abstrak dari solidaritas yang dipaksakan seperti dalam *welfare state* atau negara kesejahteraan (Hustinx, et.al., 2010: 417). *Volunteerisme* dianggap sebagai sebuah bentuk

luar biasa dari solidaritas sosial yang mengikat masyarakat. Menurut Wuthnow (1991), tindakan *volunterisme* dipandang sebagai ekspresi primer dari nilai dasar manusia seperti Ketidakegoisan, empati, kepedulian terhadap orang lain, kedermawanan, tanggung jawab sosial, dan semangat kolektif. Itu merupakan ekspresi mendasar dari rasa keterlibatan terhadap komunitas dan identitas kelompok, serta berkontribusi terhadap integrasi sosial individu (dalam Hustinx, et.al., 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Alasan pemilihan metode ini adalah partisipasi politik pemuda dalam pemilu studi kasus pada relawan Samawi pada pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya. Hal tersebut dilihat dari nilai-nilai relawan Samawi dalam memperjuangkan kepentingannya sebagai pemuda dengan cara memilih Ir. H. Joko Widodo – Amin pada Pilres 2019. Untuk menjawabnya melalui peran tokoh-tokoh pemuda dalam membentuk relawan Samawi dengan melibatkan pemuda dalam kegiatannya serta cara memobilisasi dukungan pemuda-pemuda untuk memilih Ir. H. Joko Widodo – Amin pada Pilpres 2019. Hal tersebut adanya sebuah dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak lainnya untuk menggerakkan serta meningkatkan partisipasi politik khususnya generasi muda dalam mendukung dan menggunakan hak pilihnya agar terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam proses penelitian menggunakan metode kualitatif peneliti melakukan beberapa upaya seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari nara sumber, serta menganalisis dan menafsirkan data. Metode kualitatif dipandang peneliti lebih relevan dengan masalah penelitian melalui interpretasi data untuk menjelaskan Partisipasi Politik Pemuda dalam Pemilu; Studi Kasus Pada Relawan Samawi pada Pilpres 2019 di Kota Tasikmalaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Proses Pembentukan Relawan Samawi

Samawi merupakan organisasi relawan yang dibentuk oleh para anak muda dari berbagai latar belakang profesi dan organisasi Islam, sebagai wujud *Ijtihad* dan *Ikhtiyar* politik, sekaligus bentuk bakti kepada bangsa, agama dan negara. Selain itu, hal yang paling penting untuk menepis isu-isu sara yang diarahkan pada Jokowi dan moderasi Islam karena yang tergabung dalam relawan tersebut gabungan dari kalangan ormas Islam. Munculnya organisasi relawan Samawi terdiri dari dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menandai berdirinya organisasi relawan ini adalah sosok seorang Ir. Joko Widodo yang sudah teruji secara kepemimpinan dan program yang dijalankan langsung dirasakan oleh masyarakat. Mulai menjabat dari Walikota, Gubernur hingga Presiden. Hal tersebut yang mendorong dibentuknya organisasi relawan Samawi. Ditambah dengan pendamping

Cawapresnya dari kalangan tokoh agama, KH. Ma'ruf Amin, simbol tokoh Islam moderat sekaligus tokoh organisasi Islam NU. Adanya sosok dan tokoh NU yang menjadi calon presiden membuat pemuda-pemuda NU menjadikan kekuatan tambahan untuk menjadi bagian yang mendukung secara jelas pasangan tersebut. Meskipun pionir atau tokoh pendiri relawan Samawi terdiri dari berbagai latar belakang organisasi Islam, namun secara mayoritas tokoh pendiri relawan Samawi adalah yang memiliki latar belakang NU. Faktor eksternal yang membuat berdirinya relawan Samawi ini adalah menguatnya narasi atau wacana politik identitas, yang praktis mencuat pada pilgub DKI Jakarta 2018 dan makin menguat pada momen pilpres 2019 meningkatnya isu wacana Islam konservatif yang secara diametral bertolak belakang dengan narasi NU. Untuk itulah relawan Samawi turut andil dalam melakukan *counter* narasi, terhadap isu-isu negatif, hoaks dan berita bohong, bahkan termasuk kampanye negatif, yang amat merugikan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

b. Relawan Samawi Dalam Menggalang Dukungan Pemuda NU Untuk Jokowi – Amin di Kota Tasikmalaya

Demokrasi pada umumnya menganggap bahwa partisipasi masyarakat yang lebih banyak yang digalang oleh para relawan akan membuat demokrasi yang ada akan menjadi semakin lebih baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam setiap tindakan politik. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Partisipasi politik dapat dilakukan pada saat pesta demokrasi berlangsung yaitu umumnya pada saat pemilihan umum presiden. Pada saat itu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mulai berkampanye memberikan janji-janji politik kepada masyarakat Indonesia. Partai politik berlomba mengeluarkan janji-janji politik sebagai strategi kampanye untuk mendapatkan dukungan politik dalam Pemilu Presiden. Janji-janji politik bertujuan membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah secara umum mendukung dengan berbagai dimensinya, khususnya menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu. Akan tetapi setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan menduduki jabatannya, para aktor politik ini sering lupa dengan janji-janji politik yang pernah diberikan kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakatlah yang dirugikan dan kecewa ketika mereka tidak menepati janji atau melaksanakan janji politiknya yang pernah mereka janjikan. Untuk merespon kegelisahan-kegelisahan yang terjadi dalam masyarakat, maka di Kota Tasikmalaya Samawi hadir, untuk memberikan pengetahuan atau pendidikan politik supaya masyarakat bisa lebih cerdas dalam menyikapi permasalahan khususnya dalam berpolitik. Seperti apa yang dikemukakan oleh Kaka Hanifa dalam wawancaranya tentang terbentuknya Samawi:

"Samawi terbentuk karena munculnya kegelisahan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan mas, seperti Kota Tasikmalaya yang jarang sekali tersentuh oleh kepemimpinan Pemerintah pusat sebelumnya, seperti jalan di desa-desa yang masih jauh dari harapan masyarakat, dan masyarakat menganggap Presiden sebelumnya hanya selesai dijanji mas. Selain itu gini mas, Kota Tasikmalaya ini kan luas dan APBD yang pemerintah turunkan bagi kami masyarakat itu tidak cukup mas, apalagi pengawasan dalam penggunaan anggaran desa itu tidak ada mas. Sedangkan pasar-pasar tradisional jauh dari pedesaan yang menurut kami pemerintah hanya menyediakan bagi orang-orang kecamatan, dan kami masyarakat yang di desa kurang diperhatikan, dari situlah saya secara pribadi punya inisiatif untuk membentuk sebuah organisasi yang nantinya bisa mengawal presiden terpilih, biar gak hanya tidur dan senang-senang aja mas, berhubung background saya adalah aktifis dari salah satu organisasi maka saya membentuk relawan yang juga pengalaman dalam berorganisasi mas."

Di dalam pertarungan Pemilihan Presiden, janji-janji politik kerap dicap sebagai arena kotor, karena pemerannya kerap umbar janji. Janji diumbar untuk meraih kekuasaan, tetapi dilupakan begitu saja setelah kekuasaan digenggam. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat sekiranya janji-janji yang diucapkan oleh kandidat sebelum pemilihan bisa direalisasikan setelah kandidat itu terpilih. Masyarakat bisa mengawal dan mengingatkan manakala janji-janji itu terlupakan. Dalam politik praktis, seringkali politisi menjadikan visi sebagai *lip services* (buah bibir) tanpa makna baik bagi perubahan ke hidupan masyarakat. Visi-misi hanya dijadikan sebagai senjata sesaat untuk meraih simpati rakyat. Seringkali visi-misi yang diusung hanya disusun begitu saja tanpa kajian mendalam, pertimbangan rasional, dan tidak berdasarkan data-data riil yang terkait dengan kehidupan masyarakat dan pembangunan. Visi-misi disusun sepihak oleh para politisi, gagasan dan idenya belum tentu searah dengan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran dari visi itu. Tidak adanya aturan baku yang mengatur bahwa para kandidat yang terpilih harus menunaikan janji politiknya saat kampanye, membuat masyarakat tidak memiliki wewenang untuk menuntut janji-janji politik yang telah dijanjikan. Saat kandidat yang terpilih tidak melaksanakan janjinya, masyarakat tidak bisa memaksakan agar janji tersebut dipenuhi. Sehingga kandidat terpilih cenderung mengabaikan apa yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengawal janji politik Ir. H. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin adalah dengan memanfaatkan peran Samawi untuk mengawal janji-janji politik yang telah disampaikan pada saat kampanye. Relawan yang terorganisir diharapkan mampu membenahi kondisi-kondisi sosial politik yang tidak mapan, tidak memuaskan, penuh konflik dan disharmoni. Maka menjadi penting adanya sebuah pendidikan politik bagi para relawan politik. Relawan politik yang berkumpul dalam sebuah asosiasi akan mempermudah pendidikan politik bagi individu agar dia bisa menjadi partisipan politik yang berkualitas tinggi dan bertanggung jawab secara moral terhadap sesama manusia,

lingkungan hidup, dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Samawi di Kota Tasikmalaya melakukan Pendidikan politik sebagai sarana untuk penggalangan suara bagi pasangan Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Pendidikan politik dilakukan di pesantren-pesantren, lingkungan Rukun Tetangga, Rukun Warga sampai Dusun-dusun. Pendidikan politik bagi para relawan berguna untuk memfungsikan dengan baik kekuasaan yang disandang dan belajar memberikan kontrol serta pengawasan terhadap proses-proses politik sebagai hak asasi kewarga-negaraannya.

Selain itu, pendidikan politik juga berguna untuk memaksimalkan partisipasi politik para relawan tepat pada alurnya. Sebab partisipasi politik bukan sekedar berupa inkasasi atau perolehan secara otomatis informasi politik dan data tentang situasi dan kondisi masyarakat saja, tetapi ia juga mencakup beberapa hal seperti, penentuan sikap sendiri, mampu melakukan seleksi dan refleksi secara kritis, bisa memberikan pengaruh politik, dan berbuat politik secara aktif dalam proses pembangunan politik. Dalam wawancaranya, Kaka Hanifa juga mengungkapkan:

"Samawi adalah orang yang bekerja dengan semangat pengabdian dan karenanya mereka bekerja mengabdikan dirinya tanpa pamrih. Mereka bekerja tanpa tendensi kepentingan. Walaupun kepentingan tersirat, itu kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi dan golongan."

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Aminuddin Maruf:

"Ya kalau itu pasti ada kepentingan, tapi bukan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan kelompok atau masyarakat yang percaya kepada kami tentang sikap kami yang dari awal sudah konsisten untuk memperjuangkan dan mengawalinya sampai akhir jabatan mas. Berbeda dengan relawan yang lain setelah menang ditinggalkan. Ya enak yang menang langsung pesta. Kita kan tidak begitu".

Tak bisa dipungkiri, bagaimanapun pada umumnya Politik hampir identik dengan kepentingan. Adagium-adagium politik sudah jelas, misalnya dalam politik tak ada kawan yang abadi, tak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Hal ini menggambarkan betapa kepentingan itu melekat dalam politik. Adagium lain mengatakan, dalam politik, *"there is no such thing as a free lunch"*, tak ada yang namanya makan siang gratis. Itu berarti hampir mustahil jika berpolitik tanpa kepentingan, termasuk mendukung kegiatan politik seseorang yang sedang berpolitik, tanpa kepentingan tertentu. Kepentingan dalam politik bisa bermacam-macam, bisa saja berupa harta (uang) atau juga tahta (kekuasaan, jabatan). Dan ditegaskan lagi oleh Kaka Hanifa bahwa didalam Kepentingan Samawi murni terdapat kepentingan masyarakat luas.

c. Partisipasi Politik Samawi

Konsep partisipasi dalam tata pemerintahan yang baik diyakini sebagai suatu pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberhasilan dari pemerintahan yang demokratis, penyelenggaraan bangunan yang berorientasi kerakyatan dan terciptanya keadilan sosial.

Pilihan ini mengandung konsensi dengan menguatkan partisipasi masyarakat disatu sisi dan disisi lain pemerintah harus berperan sebagai wahana untuk masyarakat yang berbeda atau saling bertentangan. Politik tidak bisa disebut sebagai perkara individual yang berdiri sendiri, ia merupakan peristiwa dalam komunikasi, peristiwa kolektif, dalam kebersamaan dan dalam situasi konflik. Untuk pemecahannya kemudian dilakukan aksi bersama untuk melakukan pendobrakan terhadap kepastian nasib peruntungan dan sikap-sikap fatalistik, penghapusan kompleks inferior, emosi-emosi ketidak mampuan dan menyerah kalah, serta mencari jalan keluar dari impasse dan jebakan-jebakan hambatan disusul dengan mencari alternatif-alternatif pemecahannya. Oleh sebab itu muncullah ide atau gagasan dari masyarakat yang di wakili oleh Samawi tentang pentingnya peran relawan atau masyarakat untuk mengawal pemerintahan yang baik, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kaka Hanifa salah satu pengurus Samawi:

“Samawi tidak sama dengan relawan pada umumnya mas, Kebanyakan relawan membubarkan diri setelah pemilihan selesai kan. Namun Samawi terus melibatkan hingga saat ini. Relawan ini membantu Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma’ruf Amin untuk mengawal janji-janji kampanyenya. Tidak hanya pada saat pemilihan tapi juga setelahnya untuk mengawal kepemimpinan Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma’ruf Amin. Relawan ini dilibatkan dalam proses realisasi janji politik yang telah dikampanyekan, agar dalam pelaksanaannya, janji politik yang telah disampaikan tepat sasaran. Maksud tepat sasaran itu berpihak kepada masyarakat Kota Tasikmalaya secara keseluruhan.. ya sampean kan orang Tasik sampean lihat aja nanti. Kira-kira dampaknya bagaimana.”

Dari sinilah muncul kegelisahan dari masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya Samawi untuk membangun pemimpin yang terus memperhatikan janji-janjinya yang telah memenangkan di Pemilu Presiden 2019, maka dari itu Aminuddin Maruf mengintruksikan terhadap tim-timnya yang berada di setiap kecamatan terus memantau seberapa besar berjalannya janji-janji politik dari Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma’ruf Amin. Dengan adanya pengawalan itu Aminuddin Maruf terus berkordinasi dengan Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma’ruf Amin melalui jalur kedekatan emosionalnya sehingga terus terjadi komunikasi yang inten agar tidak ada kesalah pahaman antara Samawi dan Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma’ruf Amin dan bisa benar-benar sesuai dengan cita-cita awal bahwa janji itu dibuat bukan hanya retorika saja akan tetapi berdampak secara nyata bagi masyarakat Kota Tasikmalaya.

Adapun bentuk partisipasi atau pengawalan relawan Samawi sebagai berikut:

- a. Diadakannya rapat internal antara Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma’ruf Amin bersama Samawi untuk menentukan dan merealisasikan janji-janji yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya.
- b. Samawi Berkomunikasi dengan kepala Desa se-kabupaten Tasikmalaya.

- c. Samawi terjun langsung ke masyarakat untuk memastikan apakah program yang telah di realisasikan itu mempunyai dampak atau membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya.
- d. Mengawal setiap program yang mau direalisasikan terhadap kepala desa dan RT/RW se-Kota Tasikmalaya.
- e. Bekerja sama dengan para santri, mahasiwa dan ulama di Kota Tasikmalaya dengan turun kebawah untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang masuk dalam program kerja Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma'ruf Amin.

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Dengan adanya komunikasi yang terus berjalan maka peneliti disini menemukan perkembangan demokrasi berkemajuan melalui Samawi, berbeda sekali dengan relawan-relawan yang pada umumnya yang hanya memfokuskan kemenangan satu calon saja dan melupakan semua janji-janji yang telah mereka janjikan.

Karena pada dasarnya, 'Politik adalah jalan kesejahteraan' karena sebagian besar kegiatan politik dilakukan dengan pembicaraan sebagai salah satu bentuk komunikasi jalan kesejahteraan. Sebaliknya 'komunikasi kesejahteraan masyarakat adalah politik' karena hampir semua komunikasi bertujuan mempengaruhi sebagai salah satu dimensi politik. Justru itu dapat dirumuskan bahwa komunikasi politik adalah "pembicaraan yang bertujuan mempengaruhi dalam kehidupan bernegara".¹ Dan menimbulkan adanya perkembangan yang terus berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Pertama, **Lobbying**. Dalam kegiatannya relawan Samawi diberbagai daerah juga melakukan upaya negosiasi atau lobby ke berbagai elemen masyarakat secara persuasif demi meningkatkan dukungan dan partisipasi untuk mendukung pasangan calon Ir. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Pada kasus yang lebih kontekstual pengurus-pengurus Samawi sering melakukan upaya negosiasi dalam membahas mengenai perkembangan, tantangan, dan hambatan dalam upaya memenangkan pasangan tersebut. Upaya negosiasi demi menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan seringkali melibatkan banyak elemen sosial-politik. Seperti melakukan rapat dan pertemuan dengan pimpinan partai di tingkatan masing-masing, tokoh agama, tokoh masyarakat, pun relawan-relawan lainnya. Kedua, **Contacting**, Relawan Samawi juga melakukan Contacting. Hal ini dilakukan sebagai upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Relawan Samawi diprakarsai oleh Aminuddin Ma'ruf bersama lima orang ulama muda lainnya. Di organisasi ini, Aminuddin menjabat sebagai sekretaris jenderal. Ketiga, Tindakan kekerasan, Tindakan Kekerasan (**violence**) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah

pihak lainnya dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan. Namun tentunya tindakan kekerasan ini tidak pernah dilakukan oleh Samawi di berbagai daerah. Karena fokus dari organisasi relawan ini adalah melakukan kampanye yang bersifat persuasif kepada masyarakat. Khususnya yang belum memiliki pilihan pada Pilpres 2019.

d. Samawi sebagai Kelompok Relawan dalam Partisipasi Politik

Peran relawan Samawi dalam konstelasi politik Indonesia seolah telah menjadi pilar utama dalam kemenangan Ir. H. Joko Widodo-Amin. Dengan cara masing-masing yang sesuai arahan, para relawan Samawi tidak jarang bergerak tanpa koordinasi dan terstruktur, tetapi dapat bergerak sendiri. Tanpa disadari relawan Samawi, telah mampu membangun pelebagaan budaya partisipatif, terutama di daerah Tasikmalaya. Hal ini ditegaskan bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh relawan Samawi adalah partisipasi politik aktif, yakni sejauh mana orang itu terlibat di organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela (*voluntary associations*), seperti kelompok-kelompok keagamaan, olahraga, pencinta lingkungan, organisasi profesi, dan organisasi buruh. Dengan melakukan tindakan-tindakan politik yang bersifat langsung dan kongkret dalam rangka mencari dan meningkatkan dukungan. Dari segi kategori jenis relawan, sebelumnya kembali perlu dijelaskan secara singkat mengenai tipologi relawan. Pertama, relawan narsis adalah mereka yang sekedar mencari popularitas. Seperti membuat spanduk dukungan untuk Ir. H. Joko Widodo disertai foto dirinya sendiri. Kedua, relawan rente, yakni relawan yang sering membuat berbagai kegiatan dan aktivitas dukungan terhadap Ir. H. Joko Widodo, namun dengan tujuan dan target mencari keuntungan semata. Para relawan ini biasanya menjadi event organizer dalam suatu acara dukungan dan mengedarkan proposal untuk pelaksanaan acara tersebut, yang tujuan akhirnya mendapatkan laba dari acara tersebut. Ketiga, relawan *fans club*, adalah mereka yang aktivitasnya hanya memuji-muji apapun yang dilakukan Ir. H. Joko Widodo dan marah-marah jika ada yang memojokkan Ir. H. Joko Widodo. Para relawan ini tidak akan segan-segan membela Ir. H. Joko Widodo jika dihina dan diserang. Maka dari itu relawan jenis ini memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua jenis relawan lainnya. Karena pada dasarnya relawan jenis fans club tidak berupaya untuk mencari dan mendapatkan insentif material dari sebuah momen politik. Bentuk dukungannya pun bersifat benar-benar sukarela dan terdiri dari latar belakang anggota yang berbeda. Sejalan dengan wawancara, Pengurus Pusat Samawi, Kaka Hanifa, yang mengatakan bahwa, "...secara komponen tim relawan kita tidak hanya NU, makanya menarik untuk diteliti, disitu ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah dan lainnya (termasuk penggerak)." Dengan sangat beragamnya latar belakang jaringan anggota Samawi. Ini menjadi bukti bahwa sebagai kelompok relawan, Samawi sendiri mempunyai warna religiusitas dalam konteks politik identitas. Narasi politik identitas yang amat kental dalam Pilpres 2019, tidak

serta merta membuat pasangan 01 yaitu Ir. Joko Widodo-KH. Maruf Amin, kebal dari serangan, berita bohong, dan lain sebagainya. Justru sebaliknya serangan-serangan amat banyak yang mengarah kepada kubu 01 tersebut. Untuk itulah diperlukan narasi tandingan untuk menepis semua kabar dan informasi tersebut. Tidak hanya lewat media sosial. Tetapi juga mensosialisasikan lewat pertemuan langsung dengan masyarakat dan jaringan Samawi. Argumentasi tersebut menjadi relevan setelah dikonfirmasi dari hasil wawancara dengan Sekretaris Jendral Samawi, Aminuddin Maruf, yang mengatakan bahwa “tujuan utama dari dibentuknya relawan Samawi adalah untuk menepis isu-isu SARA.” Dalam peran menepis isu-isu SARA tersebut, peran relawan Samawi menjadi penting, mengingat dampak dari informasi semacam berita bohong, hoaks, fitnah, kampanye hitam, bahkan kampanye negatif yang merugikan pasangan calon 01, amat masif beredar di masyarakat di Jawa Barat. Khususnya tempat yang menjadi objek penelitian ini yaitu Kota Tasikmalaya. Dimana jika dihitung secara suara di wilayah Jawa Barat secara umum dan Kota Tasikmalaya secara khusus, pasangan calon dari nomor urut tersebut, selalu kalah. Untuk itu segala upaya untuk meningkatkan simpatik, dukungan dalam konteks peningkatan suara menjadi masuk akal, ketika kelompok-kelompok relawan seperti Samawi mempunyai jaringan di Jawa Barat.

Selain itu konteks partisipasi dan pentingnya kelompok relawan, identitas kelompok relawan itu sendiri menjadi menarik untuk disimak. Pasalnya jika dilihat secara umum latar belakang anggotanya adalah berasal dari organisasi masyarakat (ormas) Islam. sehingga visi dari kelompok relawan Samawi tersebut, erat kaitannya dengan isu-isu keagamaan atau keislaman. Sebagaimana pendapat hasil wawancara dengan Kaka Hanifa, Pengurus Pusat Samawi, ia mengatakan bahwa “salah satu visi dari Samawi ini adalah upaya memoderasi narasi atau wacana konservatisme Islam di tingkat *grass root* atau masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena narasi atau wacana kelompok Islam, yang banyak menyerang kubu nomor urut 01 adalah pemerintah dituduh anti Islam. Hal ini lah yang menjadi urgensi dari pentingnya sosialisasi keislaman yang moderat, yang dilakukan oleh relawan semacam Samawi kepada masyarakat secara langsung.

Selanjutnya yang menjadi nilai lebih juga adalah bahwa, anggota dari kelompok relawan Samawi yang beragam, membuat gaya dalam berkampanye, bersosialisasi serta pendidikan politik yang dilakukan oleh Samawi juga bergantung kepada latar belakang anggotanya yang tersebut di berbagai jaringan, sebagai bentuk gaya atau karakter yang beragam. Dengan demikian transfer pemahaman antara anggota relawan Samawi dengan masyarakat bersifat lebih fleksibel. Mengikuti kultur dan kebiasaan dari suatu masyarakat. Dari pemaparan diatas, yang menjadi nilai lebih relawan Samawi, yang dapat membedakan dengan kelompok relawan lainnya adalah, bahwa dalam konteks memberikan pemahaman mengenai Islam moderat kepada masyarakat di tingkat bawah, berarti relawan Samawi menjalankan peran tidak hanya

sebagai media kampanye, tetapi juga media dakwah yang tentunya bermanfaat positif bagi masyarakat.

Dari ketiga tipologi tersebut, relawan Samawi masuk kedalam kategori *fans club*. Karena loyalitasnya terhadap Ir. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Biasanya jenis relawan politik ini berasal dari anak-anak muda. Diberbagai daerah yang menjadi bagian jaringan Samawi. Alasan ini semakin ditegaskan dengan tanggapan pengurus Samawi kota Tasikmalaya, kang Habib, mengatakan bahwa, "dalam menjalankan misi Samawi tidak pernah ada fasilitas-fasilitas yang memadai, semua menggunakan fasilitas sendiri dari Samawi. Hanya saja ada beberapa perlengkapan yang mendapat bantuan dan pinjaman dari beberapa pihak." Dengan demikian relawan Samawi jauh dari analisa relawan rente yang mengejar insentif material dalam mendukung calon tertentu pada momen politik. Dalam konteks dukungan politik dari relawan, peningkatan partisipasi publik semakin meluas. Meluasnya dukungan dan meningkatnya partisipasi politik, khususnya untuk segmentasi pemilih pemula, yang dalam kategori usia muda ini, sangat dirasakan. Lebih spesifik jika dibandingkan dengan pilpres 2014. Mengutip wawancara dengan pengurus Samawi Kota Tasikmalaya, kang Habib, ia mengatakan bahwa:

"Ada perubahan kenaikan serta memberikan dampak kenaikan pendukung Ir. H. Joko Widodo khususnya bagi kalangan pemuda khususnya organisasi kepemudaan dari berbagai kalangan golongan Islam khususnya di kota Tasikmalaya."

Peningkatan partisipasi politik pemuda kota Tasikmalaya ini tidak terlepas dari berbagai agenda kegiatan yang dilakukan berbagai kelompok. Khusus berbicara relawan Samawi di Kota Tasikmalaya beberapa agenda yang dijalankan adalah mengadakan pengajian-pengajian; mengadakan diskusi dan seminar; memasang media sosialisasi atau alat peraga kampanye di titik-titik tertentu. Semua agenda tersebut dijalankan dalam semangat pendidikan politik pula yang bersifat persuasif. Ini penting untuk dikatakan karena pada 2019, lima kategori pemilu dijalankan secara serentak. Dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan perwakilan daerah (DPD). Jika merujuk pada hasil Pilpres 2014 di Kota Tasikmalaya lalu hasil final pasangan Ir. H. Joko Widodo-JK meraih 26,07 persen atau 99.307 suara, sementara Prabowo-Hatta 73,93 persen atau 281.665 suara dari partisipasi pemilih 80,91 persen (dikutip dari kabarpriangan.com). Raihan suara pasangan calon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengalami peningkatan pada pilres 2019. Perolehan kubu 01 ini sebanyak 111.805 suara dan perolehan suara kubu 02 sebanyak 314.258 suara (dikutip dari tribunnews.com). Dari perbandingan dua periode pemilihan presiden tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat peningkatan suara pendukung 01, yaitu sebanyak 1 persen.

e. Dampak Partisipasi Politik Relawan Samawi

Dampak adalah suatu keadaan dimana ada hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dari sini peneliti langsung meninjau apa dampak

yang dirasakan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap adanya Samawi berupa kegiatan, pendidikan politik, dan bantuan sosial. Dan jelas sekali apa yang disampaikan oleh habib menyampaikan untuk konteks hari ini sebelum pemilihan ada dan walaupun tidak maksimal. Semoga ke depan ketika Ir. Jokowi terpilih kembali menjadi Presiden dan KH. Ma'ruf Amin menjadi Wakil Presiden, bisa melanjutkan, mempertahankan bahkan ada program yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Karena itu menjadi sebuah kepuasan bagi masyarakat untuk bisa terus dilaksanakan serta melaksanakan apa yang selama ini belum terealisasi pada masa sebelumnya.

Kenyataannya berbeda dengan daerah lain, sebagian besar rakyat tidak lagi memandang penting kampanye bahkan Pemilu itu sendiri karena hal ini dianggap tidak lebih dari sekedar rutinitas lima tahunan belaka yang belum pasti akan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kehidupan mereka. Terjadinya penurunan secara beruntun partisipasi masyarakat dalam setiap gelaran Pemilu di era Reformasi merupakan bukti konkretnya. Bahkan, dalam konteks Pilkada. Di beberapa daerah jumlah suara golput justru lebih besar daripada suarakemenangan pasangan calon.

Alasan mendasar yang melatar-belakangi munculnya kekecewaan masyarakat tersebut akibat janji Pemilu yang tak kunjung pernah menjadi kenyataan. Rakyat mulai sadar dan merasa hanya dibutuhkan suaranya saat Pemilu, selanjutnya diabaikan ketika kekuasaan telah tercapai.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Nasrul Rizki:

"Disini tu ada mas sering nyurvei guru ngaji kata orang itu Samawi mas, tapi kurang tepat sasaran mas, mosok tiap hari kerjanya nguli dikebon tiap malem jadi guru ngaji, ada juga tu mas santrinya yang cuma dua dapat, sedang santrinya yang agak banyak tidak dapat mas, ini juga guru anak saya tidak dapat apa-apa dari pemerintah. Ya Alhamdulillah program dulu waktu Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma'ruf Amin kampanye mau memberikan honor kepada guru ngaji sudah terlaksana meskipun kurang ngenak mas."

Berbicara dampak jelas sudah kami sebutkan di atas bahwa dampak ada dua yang pertama dampak positif dan dampak negatif, apa lagi berbicara dampak relawan politik. Disini peneliti betul-betul mencari sumber yang betul-betul independen agar apa yang diutuhkan untuk memenuhi tulisan ini benar-benar valid sesuai fakta. Karena janji kampanye para kontestan Pemilu seolah-olah hanya menjadi pemanis bibir semata untuk mengelabui rakyat agar tertarik memilih dirinya, padahal dari semula sebagian janji tersebut telah direncanakan untuk tidak dipenuhi. Maka tidak heran bila sebagian besar rakyat menganggap janji politik sangat identik dengan kebohongan. Pemilu dimata rakyat tidak lebih dari sekedar sebuah ajang tempat orang memberikan janji-janji untuk diingkari. Akibatnya, demokrasi perwakilan di Indonesia saat ini mengalami masalah *disconnected electoral* yaitu adanya keterputusan relasi antara wakil dengan yang diwakili. Sehingga seringkali tindakan yang dilakukan oleh para wakil tidak linier dengan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan dari orang-orang yang diwakili (publik).

Jika janji itu dibiarkan begitu saja maka yang akan terjadi hanya janji yang hanya selesai ketika kampanye, untuk selanjutnya tidak ada perkembangan yang berdampak terhadap masyarakat. Untuk itu Samawi terus melakukan tahap demi tahap program kerja Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin seperti apa yang kami temui di lapangan ketika mendatangi bapak Jajang.

"Kemaren saya dikasih tau Samawi, terus disuruh ngumpul ke kantor kepala desa dan dibawa ke puskesmas kecamatan untuk pemberian kartu KIS, jadi menurut saya ya itulah dampaknya mas, baguslah bagi orang yang kurang mampu mas, apalagi sekarang mahal biaya rumah sakit mas. Apalagi disini sangat desa, memang kartu itu sangat dibutuhkan, karna saya tidak ikut BPJS mas, gak tau caranya daftar mas."

Bagi masyarakat Janji politik tidak bersifat mengikat sehingga selama ini masyarakat hanya pasrah ketika hanya disuapi kebohongan. Pemberi janji tidak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi janjinya. Ia bisa saja – dan memang seringkali – mengingkari janji. Sang pemberi janji juga tidak bisa dituntut secara hukum. Rakyat yang telah mendengar dan percaya pada janji politik tidak bisa melaporkan seseorang yang telah memberi janji kepada aparat penegak hukum ataupun otoritas lainnya. Rakyat tidak akan bisa menyeretnya untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan janjinya itu. Rakyat memang berhak menagih janji, tetapi pemberi janji juga memiliki hak untuk memberi jawaban ataupun sekadar membangun "alibi" agar tak mau dicap pembohong. Janji adalah dusta dan dusta memang telah menjadi bagian inheren dalam politik. Lagi, Pemilu Presiden selalu berkorelasi dengan dusta politik. Namun demikian, janji selalu berdampak etis-moral. Janji selalu berkaitan dengan hati nurani. Jika demikian, janji yang diberikan kepada rakyat mestinya diwujudkan-konkritkan. Meskipun tidak memiliki kewajiban hukum, tetapi seseorang yang memberikan janji memiliki kewajiban etis-moral untuk memenuhinya. Berbeda dengan Samawi mereka sadar betul bahwa adanya sebuah janji maka relawana harus mengawalinya, bukan hanya mementingkan kepuasan secara kelompok atau pribadi kalau ingin demokrasi di Indonesia ini lebih memberikan dampak yang positif.

Dengan adanya pengawalan dan komunikasi yang terus dilakukan oleh Samawi dampaknya begitu dirasakan oleh Didin sebagai ketua RT, sehingga untuk memberikan program kelanjutan untuk masyarakat Didin menyampaikan akan siap dan semangat untuk tugas yang sudah diwacanakan oleh Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma'ruf Amin untuk pembagian sertifikat tanah di wilayah Kota Tasikmalaya yang belum ada sertifikatnya. Dengan adanya keluhan masyarakat Samawi langsung berkomunikasi dengan Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma'ruf Amin untuk lebih awal merelisasikan janji-janji politiknya. Di sini peran Samawi yang berbeda dengan relawan lainnya terlihat. Samawi terus mengawal janji-janji politik Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma'ruf Amin agar dapat terealisasi. Ketika peneliti mempertanyakan kinerja Samawi dari

sudut pandang Ilmuwan Sosial dari Nusa Bangsa Institute yang diwakili oleh Faisal, berikut pendapatnya:

“Masyarakat Kota Tasikmalaya sudah jenuh mengadu ke struktur pemerintah Kota Tasikmalaya, iya memang mereka itu mendengarkan tapi tidak diperhatikan semaksimal mungkin, jadi saya kira adanya Samawi bisa menjadikan masyarakat lebih diperhatikan juga lebih didengarkan, jadi saya sangat setuju dengan adanya organisasi ini, dengan harapan bisa jadi jembatan antara keluhan masyarakat dan pemerintah. Yang terpenting adalah masyarakat makmur dan sejahtera. Kalau urusan ada udang dibalik peran mereka ya itu wajar-wajar saja.”

Faisal juga berpendapat Masyarakat Kota Tasikmalaya sudah mulai jenuh terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya, sehingga kesadaran itu muncul dari Samawi untuk mengawal janji-janji politik Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma'ruf Amin. Menurutnya itu tidak melanggar undang-undang meskipun dalam struktur sudah sangat lengkap untuk melakukan program-program yang sudah diwacanakan. Berdasarkan dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya dengan adanya pengawalan terhadap realisasi janji-janji politik Ir. H. Joko Widodo dan K. H. Ma'ruf Amin oleh Samawi masyarakat Kota Tasikmalaya merasakan bahwa ada perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Dengan adanya momentum pemilihan presiden 2019, yang kental dengan politik identitas, dimana banyak beredarnya isu-isu Sara, menjadi cikal bakal berdirinya organisasi relawan Samawi yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ir. Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin. Lebih spesifik, munculnya organisasi relawan Samawi terdiri dari dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menandai berdirinya organisasi relawan ini adalah sosok seorang Ir. Joko Widodo yang sudah teruji secara kepemimpinan dan program yang dijalankan langsung dirasakan oleh masyarakat. Mulai menjabat dari Walikota, Gubernur hingga Presiden. Hal tersebut yang mendorong dibentuknya organisasi relawan Samawi. Ditambah dengan pendamping Cawapresnya dari kalangan tokoh agama, KH. Ma'ruf Amin, simbol tokoh Islam moderat sekaligus tokoh organisasi Islam NU. Adanya sosok dan tokoh NU yang menjadi calon presiden membuat pemuda-pemuda NU menjadikan kekuatan tambahan untuk menjadi bagian yang mendukung secara jelas pasangan tersebut. Meskipun pionir atau tokoh pendiri relawan Samawi terdiri dari berbagai latar belakang organisasi Islam, namun secara mayoritas tokoh pendiri relawan Samawi adalah yang memiliki latar belakang NU.

Faktor eksternal yang membuat berdirinya relawan Samawi ini adalah menguatnya narasi atau wacana politik identitas, yang praktis mencuat pada pilgub DKI Jakarta 2018 dan makin menguat pada momen pilpres 2019 meningkatnya isu wacana Islam konservatif yang secara diametral bertolak belakang dengan narasi NU. Untuk itulah relawan Samawi turut andil

dalam melakukan *counter* narasi, terhadap isu-isu negatif, hoaks dan berita bohong, bahkan termasuk kampanye negatif, yang amat merugikan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Selanjutnya selain melakukan *counter* narasi, tentunya relawan Samawi ini banyak melakukan sosialisasi dan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap pasangan calon bernomor urut 01 tersebut, di lima daerah jaringannya. Dalam melakukan agendanya relawan Samawi memfokuskan kegiatan dalam menarik segmentasi pemuda.

Hal ini dilakukan pertama karena tren pemuda sedang meningkat. Kedua, pemuda adalah segmentasi pemilih yang perlu dikawal dalam pendidikan politik. Mengingat momentum pemilihan 2019, banyak informasi-informasi bohong, negatif, tidak benar, yang dapat merusak sikap politik dan partisipasi politik pemuda, dalam konteks kehidupan berdemokrasi.

Meningkatnya organisasi kerelawanan atau voluntirisme, tentunya berdampak positif dalam peningkatan partisipasi politik, ditengah trennya meningkatnya angka golput (orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam momen politik). Dampak ini juga dirasakan di banyak daerah, tidak ketinggalan di kota Tasikmalaya.

Adapun jenis partisipasi politik relawan Samawi ini adalah partisipasi politik aktif. Yaitu keterlibatan warga negara yang bersifat politik, dan saat momen politik, secara langsung atau kongkret, untuk mempengaruhi orang atau pihak lainnya. Dalam konteks penelitian ini, relawan Samawi adalah kelompok organisasi yang terstruktur dan sistematis dari tingkat pusat maupun daerah, untuk terlibat secara aktif dan masif, mempengaruhi orang lain atau pihak lainnya dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden Ir. H. Joko Widodo, pada pilpres 2019.

Partisipasi politik aktif mereka semakin jelas, ketika melakukan kegiatan-kegiatan untuk menarik sebanyak mungkin basis pendukung pasangan tersebut. Dan tentunya secara praktis akan meningkatkan suara elektoral. Khusus di beberapa kegiatan yang dilakukan oleh relawan Samawi di Kota Tasikmalaya adalah selama masa kampanye adalah, seperti mengadakan pengajian-pengajian; mengadakan diskusi dan seminar; memasang media sosialisasi atau alat peraga kampanye di titik-titik tertentu.

Dilihat dari tipologi jenis relawan, relawan Samawi termasuk kategori relawan *fans club*. Relawan jenis *fans club* ini, adalah jenis relawan yang mempunyai rasa simpatik dan loyal (dalam konteks ini bersifat non partai) terhadap satu tokoh atau figur politik. Relawan Samawi ini, berdiri dan menyatakan dukungannya kepada Ir. Joko Widodo (sebagai calon presiden), sebelum munculnya nama KH. Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang resmi. Maka dari itu dengan pengumuman yang dilakukan oleh Ir. Joko Widodo, bahwa KH. Ma'ruf Amin adalah calon wakil presidennya, semakin membuat relawan Samawi ini "bersemangat". Pasalnya mayoritas anggota Samawi dari pusat hingga daerah adalah kader dan simpatisan NU. Dimana KH. Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden adalah salah satu tokoh NU yang dihormati.

Selain itu alasan relawan Samawi ini termasuk kategori relawan *fans club* adalah, kelompok relawan ini, sedikit sekali melakukan kegiatan dalam meraih simpatik dan dukungan masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan karena, banyak agenda-agenda kegiatan Samawi, dilakukan secara sukarela, dengan pembiayaan yang sukarela dari para anggota. Khususnya Samawi Kota Tasikmalaya yang menjadi studi kasus penelitian ini. Dari kedua alasan tersebut, yaitu pembiayaan dan kegiatan, yang terbatas, cukup argumentasi bahwa jelas relawan Samawi bukan termasuk kedalam jenis relawan rente. Namun terpatnya relawan *fans club*. Organisasi relawan yang berdiri tahun 2018 ini, termasuk juga relawan Samawi di kota Tasikmalaya, turut andil dalam meningkatkan suara pasangan calon Ir. Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin, di kota Tasikmalaya. Dari sebelumnya pada perolehan suara tahun 2014 Ir. H. Joko Widodo mendapatkan total suara 99.307 suara. Dan pada 2019 pasangan dari nomor urut 01 ini meraih total 111.805 suara. Peningkatan suara Ir. H. Joko Widodo di kota Tasikmalaya ini memang tidak sepenuhnya karena upaya kerja-kerja politik dari relawan Samawi, tetapi yang patut disimak adalah, kehadiran kelompok relawan pada konteks konstelasi politik pemilihan presiden di kota Tasikmalaya adalah hal yang baru. Selain itu, segmentasi pemilih yang menjadi “sasaran” relawan Samawi, yaitu kategori pemuda. Dimana segmentasi pemilih seperti ini tidak begitu banyak pada pemilihan presiden 2014. Untuk itulah kelompok pemilih tersebut perlu “dijemput” untuk mendukung pasangan Ir. Joko Widodo dan KH. Maruf Amin.

Hal-hal tersebut yang turut serta menjadikan partisipasi politik di Kota Tasikmalaya meningkat salah satunya merupakan hasil daripada kerja relawan Samawi. Walaupun angka suara Ir. H. Joko Widodo – Ma'ruf Amin masih mengalami kekalahan.

REFERENSI

- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Amit Kumar, J. Kaur, & P. Singh. (2010). *Fuzzy Optimal Solution of Fully Fuzzy Linear Problems with Inequality Constraints*. International Journal of Applied Mathematics and Computer Sciences 6. 1. Hlm. 37 – 41.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka. Utama.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 1998, *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication. Hal 65.
- Dalton, Russel J., David M. Farrell, dan Ian Mcallister. 2011. *Politik Pihak dan Linkage Demokrat: Bagaimana pihak Mengatur Demokrasi*. New York: Oxford University Press.
- Eikenberry, Angela M. 2009. *Memberikan Lingkaran: Filantropi, Sukarela Asosiasi, dan Demokrasi*. Bloomington: Indiana University Press.
- ElectionGuide. 2019. “Republik Indonesia.” [Http://www.election-guide.org/countries/id/102/](http://www.election-guide.org/countries/id/102/) (13 Februari 2019).

- Ekman, Joakim dan Erik Amna. 2012. *"Partisipasi Politik dan Civic Keterlibatan: Menuju New Tipologi Urusan manusia"*, 22 (3): 283- 300. <https://doi.org/10.2478/s13374-012-0024-1>
- Krouwel, André. 2006. *"Model Party."* Di Handbook of Politik Partai, disunting oleh Richard S. Katz dan William J. Crotty, California: SAGE Publications Ltd, 249-269.
- Moleong, Lexi J. 2014. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robison, Richard dan Hadiz, Vedi R. 2004. *Reorganisasi Power In- donesia: Politik Oligarki di Era Pasar*. London dan New York: RoutledgeCurzon.
- Joan Nelson & Samuel P. 1994 Huntington. *"Partisipasi Politik di Negara Berkembang"*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tesis, Jurnal dan Karya Ilmiah :

- Herdiansah, Ari Ganjar, Wahyu Gunawan, dan Rd. A. Tachya Muhagila. 2014. *"Gerakan Komunitas Kota dan Politik Pemilu hearts Pemenangan Ridwan Kamil Oded Danial PADA Pemilihan walikota Bandung 2013." di Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi III: Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Yang Bermakna*, Yogyakarta, 20-22 Mei 2014. Yogyakarta: Jurusan Sosiologi UGM-ISI-APPSI, 955975.
- Utomo, Wisnu Prasetya. 2013. *"Menimbang Media Sosial hearts Marketing Politik di Indonesia: Belajar Dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012."* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17 (1): 67-84.
- Verba, Sidney dan Norman H. Nie. Tahun 1987. *Partisipasi di Amerika: political Demokrasi dan Kesenjangan Sosial*. Chicago dan London: University of Chicago Press.
- Herdiansah, Ari Ganjar, 2019. *"Partisipasi Politik Konvergensi di Indonesia Sebuah Studi Relawan Partisan Dalam Pemilu 2019"*. Jurnal Politik, Vol. 4. No. 2. Februari 2019.
- Purboningsih, Sayekti Dwi. 2015. *"Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis; Relawan Politik Dalam Pilpres 2014 di Surabaya"*. Jurnal Review Politik Vol.05, No.01, Juni 2015.
- Aba, Ignasia Devia, 2019. *"Strategi Kampanye Politik Relawan GOJO (Golkar Jokowi) Dalam Mencegah Penyebaran Hoax Anti Jokowi; Studi Pada Relawan GOJO (Golkar Jokowi) di Facebook"*.
- Ariyanto Bambang, 2016. *"Menakar Peran Relawan Politik Pasca Kontestasi Presidensial 2014"*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 20, Nomor 1, Juli 2016.
- Paskarina, Caroline. 2018. *"Kesukarelaan sebagai Alternatif Awal Warning Sistem dalam Mendukung Pengawasan Pemilu."* Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik 32 (2): 128-139.
- Senova, Annisa. 2016. *"Literasi Media Sebagai Strategi Komunikasi Tim Sukses Relawan Pemenangan Pemilihan Presiden Jokowi-JK di Bandung"* Jurnal Kajian Komunikasi 4 (2): 142-153. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol4n2.3>